ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.9, Agustus 2023

Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul

Bella Nata Syah[1], Supardal[2]
[1,2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
E-mail: bellanatasyah97971@gmail.com[1], gusdal66@gmail.com[2]

Article History:
Received: 09 Juli 2023
Revised: 16 Juli 2023
Accepted: 17 Juli 2023

Keywords: *Village Infrastructure Development Strategy, Community Involvement and Barriers*

Abstract: *Infrastructure development in village areas is an important part of national development. Since the issuance of Law No. 6/2014 on Villages, villages have the authority to manage and organize their government and territory. One of the village's tasks is to carry out development in order to improve the community's economy and improve the standard of living of the village community and advance the village. Kalurahan Pacarejo is a Kalurahan attached to Kapanewon Semanu, Gunung Kidul Regency. The Kalurahan has a very large area and has twenty-four (28) padukuhan. In this case, the Pacarejo Village Government cannot carry out infrastructure development in all padukuhans in the same year. Moreover, with a very minimal budget to carry out infrastructure development in all hamlets. This makes the Pacarejo Village Government must be able to have a strategy in infrastructure development so that the development carried out is appropriate and has potential that can be developed and has a positive impact on the Village government and the Pacarejo Community. With these problems, researchers are interested in focusing on this research with the title. Pacarejo Village Government Strategy in Infrastructure Development in Pacarejo Village, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul Regency". The research method used in this research is descriptive qualitative method. The research subjects were determined by purposive technique and the informants were Lurah, Carek, Ulu-ulu, Pangripta, Bangmuskal, Dukuh, PKK, Karang Taruna and Pacarejo residents. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation, then, data analysis techniques by means of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the strategies carried out by the Pacarejo Village Government in infrastructure development are: (1) Infrastructure development planning is made from the aspirations of the community during meetings and hamlet meetings. The guideline in determining infrastructure development is the vision and*

mission of Pacarejo Village because in the vision and mission it is written that the focus of Pacarejo Village's infrastructure development is roads and water. Then, a priority and rotating development system will be applied so that each padukuhan can receive development according to what has been planned and agreed upon during the Kalurahan Musrenbang.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai dasar hukum dan bentuk administrasi yang mengatur segala sesuatu tentang desa. Pasca terbitnya Undang-Undang desa atau dengan istilah lainnya mulai mendapatkan kedudukan yang jelas dan pengakuan. Undang-Undang ini menjadi harapan baru khususnya bagi desa dalam mewujudkan pertumbuhan desa dan kemandirian desa, serta menjadi acuan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah. Pembangunan nasional harus berorientasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga diharapkan akan muncul kemandirian desa.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerinahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung dibawah pemerintah daerah atau kabupaten. Sistem penyelenggaraan pemerintah desa berfungsi untuk melayani, membina, mengayomi dan penggerak partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan pada asa-asa berikut yaitu, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah paradigma tentang desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan diposisikan menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (UU No.6 Tahun 2014 Pasal 24).

Pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa, khusunya dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan, selanjutnya hasil MusDes menjadi pedoman penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta daftar usulan RKPDes. Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. RPJMDes mengacu pada RPJMD kabupaten/kota, memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Penetapan RPJMDes adalah dalam waktu 3 bulan sejak pelantikan kepala desa.

RPJMDes dijabarkan dalam RKPDes sebagai rencana tahunan yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu dalam penyusunan RKPDes juga memperhatikan informasi dari pemerintah kabupaten/kota mengenai pagu indikatif desa, rencana kegiatan pemerintah, pemrintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. RKPDes mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, untuk kemudian menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDes. Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah kabupaten/kota, dan dalam hal tertentu juga dapat mengusulkan kepada pemerintah dan pemerintah provinsi. Dalam hal pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka dimuat dalam RKPDes tahun berikutnya. Dalam hal terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik/ekonomi, kerusuhan social yang berkepanjangan, atau perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka RPJMDes dan RKPDes dapat diubah setelah disepakati dalam Musrenbangdes dan kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa. Dalam program yang berskala desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaanya kepada desa, sedangkan penganggarannya dicatat dalam lampiran APBDes.

Pelaksanaan pembangunan desa yang saat ini banyak dilakukan oleh desa-desa yang ada di Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan Infrastruktur desa sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional dan merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat terutama masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur desa meliputi bangunan, pasokan listrik, irigasi, air bersih, jalan, jembatan dan lainnya sesuai kebutuhan desa. Dalam pembangunan infrastruktur desa melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa dan masyarakat akan bermusyawarah untuk menentukan pembangunan apa saja yang akan dilakukan. Undang-Undang Desa Pasal 82 menyatakan bahwa halnya masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian, masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantau dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, pemerintah desa wajib menginformasikan dan melakukan transparansi terhadap perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes dan RKPDes serta APBDes kepada masyarakat desa melalui layanan informasi dan melaporkan dalam musyawarah desa (MusDes) paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Strategi dari pemerintah desa sendiri dalam mengatasi permasalah yang terjadi yaitu dengan cara menyediakan PAMDes yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membuat sumur bor dibeberapa padukuhan. Kemudian, ada beberapa jalan padukuhan yang sudah mulai diperbaiki. Namun, tidak semua padukuhan menerima sumur bor dan perbaikian jalan. Maka, dengan banyaknya padukuhan dan permasalah yang berbeda-beda membuat pemerintah desa Pacarejo harus membuat perencanaan yang tepat sasaran. Artinya, pembangunan yang dilakukan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan fokus utama pembangunan masyarakat sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan efisien dalam

penyelenggaraannya. Pembuatan RPJMDes dan RKPDes harus sesuai aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan disetiap padukuhan dan masyarakat desa dapat menerima manfaat atas pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2013:18-19).

Teknik pengumpulan data meliputi 3 (tiga) teknik: yakni observasi secara langsung, wawancara mendalam untuk mengambil data-data primer, dan dokumentasi. Observasi partisipan dengan cara peneliti terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat dan bahkan setiap hari bersama-sama dengan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan. Adapun dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data yang bersumber dari buku, internet, ataupun dokumen lain yang menunjang data penelitian.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi) dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pada tahap analisis data kualitatif, ada beberapa tahap yang digunakan oleh peneliti, yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. (Sugiyono 2013:56)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur berfokus pada kawasan-kawasan pontensial dan strategis pada wilayah. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah sampai ke desa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mengurangi pengangguran, mengetaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi baik negara maupun warga masyarakat. Kemudian lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan nasional maupun daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian maupun pertumbuhan dunia usaha.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada wilayah atau daerah perkotaan namun juga pada daerah pedesaan. Kalurahan Pacarejo yang

terletak di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Kalurahan Pacarejo memiliki luas wilayah kurang lebih 36.931.810 ha dan terdiri dari dua puluh delapan (28) Padukuhan. Kalurahan Pacarejo menjadi salah satu Kalurahan yang wilayahnya sangat luas dan memiliki banyak Padukuhan. Dalam melaksanakan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, pemerintah Kalurahan Pacarejo membutuhkan strategis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan mengingat luasnya wilayah dan banyaknya padukuhan yang harus dibangun serta dana yang terbatas. Strategi pembangunan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Pacarejo

a) Perencanaan

Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pemerintahan Kalurahan Pacarejo memiliki visi yaitu mewujudkan Pacarejo yang berkemajuan. Kemudian, memiliki misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, metode kerja yang berbasis teknologi informasi, mengeksplorasi potensi Kalurahan Pacarejo sebagai pengdongkrak pendapatan asli desa, meningkatkan manajemen tata kelola air sebagai modal peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian dan pemenuhan air bersih, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjadikan peran penting bidang pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan desa sesuai dengan visi misi kalurahan.

Pernyataan dari Suhadi, pada intinya bahwa visi misi sendiri menjadi Pacarejo sebuah Kalurahan berkemajuan. Jadi Pacarejo yang berkemajuan intinya bahwa visi misi itu dibuat, di konsep sesuai dengan aspek kebutuhan yang ada di Kalurahan Pacarejo. Sehingga Pacarejo ini sebuah rumah besar. Kalau umpamaannya ini ingin dibuat maju makannya konsenya seperti ini. Nah, visi misi itu didasarkan atas kebutuhan, kebutuhan yang kemudian ada hubungannya dengan aspek potensi. Pontensi alam dan sumber daya manusia, sehingga makanya kemudian timbulnya visi misi itu. Jadi intinya bahwa eh visi misi itu menjadi sebuah konsep yang akan dijalankan oleh pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam konteks melayani masyarakat secara prima" (wawancara, 2 Mei 2023).

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat dikeathui bawha harapan dari Pak Suhadi selaku Luhar Pacarejo agar kedepannya Kalurahan Pacarejo bisa lebih maju baik dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Bahkan, di dalam visi misi pemerintah Kalurahan Pacarejo terdapat dua aspek pembangunan infrastruktur yaitu air dan jalan. Kondisi geografis Kalurahan Pacarejo wilayahnya berupa perbukitan dengan keadaan jalan yang sebagian masih berupa jalan tanah dan berkelok-kelok sehingga diperlukan pembangunan fasilitas jalan rabat beton yang memadai, terutama di sektor pariwisata yang sedang dikembangkan. Kemudian, di Kalurahan Pacarejo saat musim kemarau tiba, masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk digunakan. Fokus pembangunan infrastruktur Kalurahan Pacarejo yaitu jalan dan air di Kalurahan Pacarejo.

Perencanaan merujuk pada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan. Dalam

menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Pacarejo dilakukan melalui beberapa tahap.

Dari pernyataan Suhadi selaku Lurah Pacarejo, mengatakan bahwa semua perencanaan yang dibuat dan yang nanti akan dilaksanakan harus itu melalui proses atau tahap musyawarah dusun (Musdus). Musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dukuh, RT, RW, tokoh masyarakat dan masyarakat padukuhan itu sendiri. Ide-ide atau aspirasi masyarakat dikumpulkan saat pertemuan musyawarah dusun tersebut. Baik Pak Dukuh, RT, RW, tokoh masyarakat dan masyarakat padukuhan bersama-sama membuat dan merencanakan pembangunan infrastruktur, program dan kegiatan yang akan dilakukan di padukuhan selama satu tahun ke depan dan enam tahun ke depan. Hasil musyawarah dusun yang sudah disepakati bersama tersebut dibawa ke dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Kemudian, hasil dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disetujui bersama-sama akan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan secara administarsi setiap tahunnya akan masuk ke Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kalurahan Pacarejo melakukan pembangunan infrastruktur dengan dasar kebutuhan masyarakat setempat. Dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur pemerintah kalurahan menyerap ide-ide dan aspirasi dari masyarakat dari setiap padukuhan maupun kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di Padukuhan Pacarejo. Ide-ide dan aspirasi ini disampaikan pada saat musyawarah dusun maupun pada saat pertemuan kelompok-kelompok yang ada di Kalurahan Pacarejo. Pada saat musyawarah dan pertemuan tersebut, maka dirembuk pembangunan infrastruktur yang utama dan terpenting serta harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, hasil dari musyawarah dusun dan pertemuan kelompok dibawa pada saat pertemuan musyawarah rencana pembangunan kalurahan yang dilaksanakan di balai kalurahan.

Proses perencanaan pembangunan infrastruktur, program dan kegiatan dilakukan melalui musyawarah dusun dan pertemuan para kelompok-kelompok yang ada di Kaluraha Pacarejo itu sendiri. Hasil akhirnya dalam perencanaan merupakan kesepakatan dan persetujuan bersama antara pemerintah kalurahan dengan warga masyarakat yang ikut terlibat dalam pertemuan tersebut. Setelah disepakati bersama, maka perencanan pembangunan infrastruktur akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Setiap pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakn perlu dimasukkan ke dalam APBKal karena untuk memastikan dana atau anggaran yang diperlukan saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan seperti itu pemerintah Kalurahan Pacarejo sudah memiliki paduan yang jelas terkait anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur.

Perencanaan pembangunan infrastruktur direncanakan dan disusun oleh keterlibatan masyarakat padukuhan. Tidaknya hanya keterlibatan secara memberikan ide, pendapat dan aspirasi. Masyarakat juga membuat KAS atau iuran rt atau padukukan, hal ini dilakukan untuk membantu pembangunan infrastruktur jika suatu saat mengalami kekurangan anggaran atau material. Dapat disimpulkan bahwa keteribatan masyarakat sangatlah besar dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat betul-betul serius dalam memikirkan pembangunan yang diperlukan dan dibutuhkan untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kemajuan padukuhan maupun kalurahan. Segala usulan dan aspirasi tidak hanya untuk kepentingan masyarakat sendiri, namun juga untuk kepentingan

padukuhan dan kalurahan.

Keteribatan dari masyarakat maupun kelompok-kelompok yang ada di Kalurahan Pacarejo menjadi pengaruh yang sangat besar dalam setiap penentuan perencanaan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi dan dapat bersama-sama mengembangkan serta memajukan Kalurahan Pacarejo agar kedepannya terus bertumbuh dengan baik. Berdampak baik pada kehidupan masyarakat dengan menumbuh perekonomian masyarakat yang lebih maju. Pada akhirnya tidak ada lagi masyarakat yang masih mengalami kemiskinan dan pengangguran. Begitupun dengan keterlibatan kaum wanita dalam ikut merencanakan dan pembahas pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.

Suksesnya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari peran wanita. Keterlibatan perempuan ini untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam lingkup perencanaan. Pemerintah Kalurahan Pacarejo tidak membatasi keterlibatan dari kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan atau saat mengikuti musyawarah baik di tingkat padukuhan maupun kalurahan. Walaupun secara tidak langsung PKK tidak mengusulkan pembangunan infrastruktur, namun PKK tetap mendukung pembangunan yang akan dilakukan. Pada akhirnya dampak yang diterima juga dapat nikmati oleh PKK maupun dengan program atau kegiatan PKK itu sendiri.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan tahapan setelah dilakukannya perencanaan pembangunan yang dibuat masyarakat dan diputuskan bersama pemerintah kalurahan, tokoh masyarakat, kelompok dan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah aktifitas atau usah untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dibuat dan sudah diperhitungkan anggaran serta kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu langkah yang strategis dan operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari pembangunan yang sudah ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur di Kalurahan Pacarejo dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Kalurahan Pacarejo diinformasikan kepada pemerintah kalurahan dan diintergrasikan dengan rencana pembangunan kalurahan. Masyarakat kalurahan berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Pacarejo. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang sudah menjadi prioritas dan juga sudah disepakati bersama antara pemerintah Kalurahan Pacarejo dengan masyarakat.

Priotitas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Kalurahan Pacarejo dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Kemudian, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif dan peningkatan kualitas ketertiban serta ketentraman masyarakat kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kalurahan seperti jalan pemukiman, jalan kalurahan, dan infrastruktur kalurahan lainnya sesuai kondisi serta kebutuhan kalurahan

Menurut Suhadi selaku Lurah Pacarejo, bahwa sesudah perencanaan itu disepakati bersama saat musyawarah rencana pembanguna, maka pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan dengan membentuk tim khusus pelaksanaan pembangunan. di dalam tim pelaksanaan pembangunan merupakan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. artinya pembangunan yang dilakukan tidak hanya asal jadi, namum pemerintah Kalurahan Pacarejo pembangunan infrastruktur yang dilaksanaan akan bertahan lama sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang sangat panjang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan yang sudah disepakati, maka akan langsung realisasikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan juga sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk melalui forum sehingga orang-orang yang berkompeten dibidangnya dipilih dan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan. Walaupun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh tim khusus, pemerintah kalurahan tidak lepas tangan begitu saja. Namun tetap mengkontrol atau *monitoring* ke lapangan untuk melihat secara langsung pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Pelaksanaan pembangunan pemerintah kalurahan akan membuat Rencana Kerja Tindaklanjut. Hal ini dilakukan untuk memastikan betul-betul waktu terlaksananya pembangunan yang sudah direncanakan. Terkadang tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau sesuai keinginan. Namun, ketika ingin dilaksanakan terkadang ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Maka dari itu pemerintah kalurahan sebelum membentuk tim pelaksana kegiatan akan terlebih dahulu membuat rencana kerja tindaklanjut untuk memastikan bahwa pelaksanaan itu dapat dilakukan pada waktu yang pas. Agar pembangunan yang kerjakan tidak sia-sia dan tidak gagal ditengah jalan proses pelaksanaan. Jalan dan air menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur di Kalurahan Pacarejo. Pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada akses jalan keluar masuk padukuhan maupun kalurahan, namun pemerintah kalurahan juga membuat akses jalan untuk ke ladang pertanian atau yang disebut Jalan Usaha Tani (JUT).

Pemerintah kalurahan terus mencba dan mencari opsi-opsi dan strategi lainnya yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur air di Padukuhan Banyumanik dan Piyuyon. Salah satu opsi yang diajukan oleh pemerintah kalurahan yaitu mencoba membuat jaringan air dari sumber air di padukuhan Serpeng dan kemudian dialiri ke padukuhan tersebut. Selain opsi tersebut, pemerintah kalurahan masih berusaha meminta izin untuk mencari sumber air dari hutan yang dekat dengan kedua padukuhan. Jika menemukan titik sumber air di hutan tersebut maka dapat di aliri ke kedua padukuhan. Namun karena itu masih opsi dan belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, untuk sementara waktu pemerintah kalurahan hanya dapat mengandalkan air dari PDAM yang diangkut mengunakan mobil tangki.

Tidak hanya pemerintah kalurahan yang berusaha dalam mengatasi masalah di Padukuhan Banyumanik dan Piyuyon. Namun pak dukuh dan masyarakat padukuhan tersebut juga ikut berusaha agar dapat memiliki sumber air dan ketersediaan air dapat dipenuhi. Padukuhan bekerja sama dengan dengan perusahaan yang ada disekitaran padukuhan dan bekerjasama dengan kampus-kampus seperti sekolah advokasi dari UGM untuk melakukan penelitian di padukuhan. Sehingga dengan adanya kegiatan penelitian tersebut, diharapkan mampu memberikan hasil atau penemuan terkait titik sumber air.

c) Pengawasan

Pembanguanan infrastruktut tidak hanya membuat perencanaan dan pelaksanaan saja,

namun juga dibutuhkan pengawasan. Di dalam suatu pembangunan harus disadari bahwa pentingnya suatu pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, pemborosan, kebocoran, dan penyelewengan dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta penyimpangan-penyimpangan akan mungkin terjadi. Pengawasan pembangunan infrastruktur adalah rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Dapat diartikan bahwa pengawasan pembangunan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan dengan kinerja yang telah ditetapkan dan proses mengawasi serta membimbing untuk menghindari adanya suatu kesalahan ataupu penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di Kalurahan Pacarejo tentunya harus dilakukan karena pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan yang sudah direncanakan dan dibahas dalam pertemuan musyawarah rencana pembangunan. Jika pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana awal, maka pemerintah kalurahan maupun masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak atau tim pelaksana pembangunan. selain itu, pengawasan tidak hanya dilakukan saat pelaksanaan pembangunan selesai dibangun, namun dalam masa proses pelaksana pembangunan infrastruktur sudah diawasi. Tentunya hal ini dilakukan jikalau ada kesalahan maka dapat perbaiki diawal. Pengawasan pembangunan infrastruktur turut adanya keterlibatan masyarakat, karena masyarakat ingin memiliki infrastruktur yang berkualitas dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Pengawasan pembangunan pemerintah Kalurahan Pacarejo membentuk tim khusus. Tim khusus pengawasan terdiri dari Bangmuskal, LPMKal, dan tokoh masyarakat. Fungsi dari pembentukan tim khusus ini untuk meciptakan *quality control* dari pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Sehingga pada saat pembangunan infrastruktur tersebut selesai dibangun sesuai dengan perencanaan. Artinya pembangunan tersebut tidak kurang baik dari segi ukuran, volume, anggaran dan sebagainya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, maka tim pelaksana harus mempertanggujawabkan hasil kerja. Jadi tim ini dibentuk untuk memonitoring dan evaluasi hasil pembangunan yang dilakukan.

Pemerintah Kalurahan Pacarejo tidak hanya melakukan pengawasan, namun juga ada transparasi yang dilakukan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kalurahan. Artinya pemerintah kalurahan tidak menutup diri dari perkembangan jaman, namun ikut terlibat dalam menfaat teknologi yang ada. Seperti yang sudah tertera atau tertulis pada misi kalurahan Pacarejo “metode kerja yang berbasis teknologi informasi”. Dalam hal ini sudah diwujudkan dengan adanya *website* Kalurahan Pacarejo yang bernama Pacarejo.id. Di dalam *website* tersebut kita dapat mengetahui apa saja, baik profil kalurahan, anggaran yang masuk dan keluar, serta perencanaan yang dilakukan dalam satu tahun ke depan. Semuanya sudah ada di dalam *website* tersebut dan itu dapat di akses oleh siapa pun.

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah kaurahan akan memasang papan informasi di dekat pembangunan tersebut. Di dalam papan informasi tersebut terdapat informasi mengenai nama pembangunan, anggaran yang dipakai, dan ukuran pembangunan tersebut. Selain papan informasi pembangunan, pemerintah kalurahan juga memasang papan informasi yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal) di sudut-sudut yang strategis. Hal ini

dilakukan agar masyarakat tahu terkait anggaran yang dikeluarkan pemerintah kalurahan dan itu dilakukan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kalurahan kepada warga masyarakat Pacarejo.

Pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam melaksanakan transparansi sudah menggunakan media teknologi informasi. Pemerintah Kalurahan Pacarejo membuat *website* pacarejo.id untuk memberikan informasi serta transparansi pembangunan. tidak hanya pembangunan, namun semua aktifitas pemerintah kalurahan dapat dilihat oleh masyarakat luas dan tidak hanya untuk masyarakat Pacarejo. Selain menggunakan *website*, pemerintah Pacarejo juga memasang papan informasi disetiap pembangunan infrastruktur yang dibangun. Dalam papan informasi tersebut terdapat jenis pembangunan yang dilakukan, anggaran yang dikeluarkan dan ukuran pembangunan tersebut. Kemudian, papan informasi yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal) juga masih dipasang disudut-sudut yang strategis. Selain itu masyarakat juga mudah dalam mendapatkan informasi karena memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah kalurahan dan dukuh, rt, rw, serta tokoh masyarakat akan memberikan dan menyampaikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat.

2. Hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Pacarejo

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur walaupun adanya perencanaan yang matang, namun saat dilapangan pasti atau biasanya terjadi hambatan-hambatan yang tidak terduga. Dalam pembangunan infrastruktur tentunya pemerintah Kalurahan Pacarejo mengalami hambatan yang membuat mau tidak mau pelaksanaan pembangunan tersebut harus tertunda atau mengalami kegagalan. Dalam menghadapi hambatan tersebut, pemerintah kalurahan maupun masyarakat harus mempunyai cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pernyataan dari Suhardi, berbicara tentang pembangunan infrastruktur itu tidak akan ada habisnya karena kita tahu bahwa Pacarejo memiliki wilayah desa yang sangat luas. Luasnya diangka 3.963 hektar hampir 4.000 hektar dengan 28 padukuhan, dengan jumlah jiwa 17.734 jiwa. Sehingga untuk pembangunan infrastruktur menjadi terhambat karena luas wilayah yang begitu besar dan setiap tahun kita itu hanya bisa mengacover 6 sampai 8 padukuhan. Biasanya dibangun sekarang ini dapat giliran tapi 2 atau 3 tahun kemudian jalan sudah rusak. Sebenarnya titik berat kita membangun itu kepingin membangun yang konteksnya itu bisa berkelanjutan. Sehingga ketika kita memperhitungkan anggaran itu tidak habis 1 atau 2 3 tahun (wawanacara, 2 Mei 2023).

Dari hasil penelitian bahwa hambatan yang dialami oleh pemerintah Kalurahan Pacarejo dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yaitu ada dua. Pertama, Kalurahan Pacarejo miliki wilayah yang sangat luas dam juga memiliki dua puluh delapan (28) padukuhan. Sehingga tiap tahunnya tidak dapat melakukan pembangunan ke semua padukuhan, hanya ada enam sampai delapan padukuhan yang mendapat giliran untuk pelaksanaan pembangunan. Mau tidak mau pemerintah membuat sistem pritoritas dan kalender pembangunan agar pembangunan infrastruktur dapat tersasar ke semua padukuhan. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan tidak bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pada akhirnya pemerintah kalurahan mengalami kesulitan untuk melakukan pembangunan di padukuhan lainnya dan secara tidak langsung membuat pemerintah membuang anggaran. Sehingga selama waktu enam tahun belum tentu semua padukuhan bisa menerima pembangunan.

Pemerintah Kalurahan Pacarejo masih kurang dalam kajian dan analisis terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Akibat masih kurangnya kajian dan analisis

dalam pembangunan infrastruktur membuat beberapa pembangunan infrastruktur yang dikerjakan tidak bertahan lama dan tidak memberikan *income* kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat. Dengan adanya kajian dan analisis yang mendalam, diharapkan pembangunan infrastruktur yang dibangun dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya dalam jangka waktu yang panjang juga. Dengan adanya kajian dan analisis dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan potensi bagi perkembang dan kemajuan Kalurahan Pacarejo. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskiaan serta pengangguran.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga terjadi hambatan dalam bentuk anggaran. Walaupun pada saat perencanaan sudah dihitung betul-betul anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, saat proses pelaksanaannya dapat terjadi kesalahan, misanya kesalahan dalam menakar material atau salah dalam penapsiran untuk pembangunan jalan usaha tani. Mau tidak mau untuk sementara waktu pembangunan dihentikan sampai adanya anggaran yang mencukupi. Pemerintah kalurahan maupun padukuhan beserta masyarakat akan menjadi anggaran atau bantuan material untuk dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan.

Pernyataan dari Sardal, kendala yang terjadi pada tahun anggaran 2022 secara umum masyarakat sangat membutuhkan jalan usaha tani membutuhkan fasilitas itu. Cuma karena waktu itu harus banyak pohon yang kita tebang ya, diawal masyarakat intinya merelakan untuk pelebaran badan jalan artinya yang dari setapak kita standarkan ke 3 meter dan masyarakat tidak apa-apa. sudah kita rencanakan, kita alokasikan, nah pada saat pelaksanaan kebetulan ada warga yang istilahnya yang tidak bersedia untuk menebang pohonnya, istilahnya "monggo menebang untuk jalan, cuma yang menebang harus kami". Nah sementara di perencanaan kan kami tidak boleh ada alokasi sing buat katakanah pembersihan lahan atau tebangan dongklak ya apa pokok itu ya. Itu jadi kendala akhirnya eh kegiatan itu bisa terlaksana tapi hasil itu tidak sesuai harapan karena gimana ya keterbatasan kesadaran dari semua pihak" (wawancara, 2 Mei 2023).

Dari hasil penelitian bahwa masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Akibat kurangnya pemahaman dan perbedaan pendapat masyarakat membuat pelaksanaan pembangunan tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Apalagi pembangunan infrastruktur yang akan dibangun sudah diperhitungkan terkait anggaran ataupun alokasinya. Pemerintah kalurahan tidak dapat sesuka hati mengubah anggaran yang sudah ditetapkan bersama. Dibutuhkan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah kalurahan, padukuhan, rt, rw serta tokoh masyarakat harus dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Agar hambatan-hambatan dari masyarakat tidak terjadi kembali karena informasi yang diberikan jelas dan masyarakat paham pentingnya pembangunan infrastruktur yang dibangun. Selain itu pemerintah kalurahan ataupun dari padukuhan harus membuat surat perjanjian dengan masyarakat yang punya tanah, untuk diizinkan dibangunan pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan dan disepakati bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Pacarejo yaitu ada lima yaitu luas wilayah Kalurahan Pacarejo dengan dua puluh delapan (28) padukuhan, kurangnya kajian dan analisis dalam pembangunan yang dilakukan, kondisi alam atau iklim yang tidak menentu, dan anggaran yang terbatas serta kurangnya pemahaman masyarakat

terkait pembangunan yang dilaksanakan. Dengan adanya hambatan-hambatan di tersebut, pemerintah kalurahan, padukuhan dan masyarakat bersama-sama mengatasi hambatan yang terjadi. Tujuan pembangunan infrastruktur yang paling utama adalah untuk meningkatkan perekonomia masyarakat dan mengembangkan serta memajukan Kalurahan Pacarejo. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang layak guna, harapannya mempermudah masyarakat dalam menjalakan aktifitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasi pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Pacarejo

a) Perencanaan

Perencanaan pembangunan infrastruktur berasal dari visi dan misi pemerintah Kalurahan. Ada dua pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan infrastrutkur di Kalurahan Pacarejo yaitu jalan dan air. Dalam membuat perencanaan pembangun dilakukan Musyawarah Dusun dan pertemuan kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di Kalurahan Pacarejo. Hasil yang sudah disepakati dan diputuskan bersama dari musyawarah dan pertemuan, kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan kalurahan. Kalurahan Pacarejo memiliki dua puluh depaan padukuhan, maka dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kalurahan Pacarejo membuat kalender perencanaan pembangunan. Kalender ini digunakan untuk mengetahui padukuhan-padukuhan yang sudah menerima dan belum dilakukan pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya padukuhan bergantian menerima pembangunan infrastruktur. Keterilibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penentuan perencanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakatlah yang lebih tahu kebutuhan yang diperlu di masing-masing padukuhan mereka.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh tim-tim yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Namun tidak terlepas juga dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam melaksanakan beberapa pembangunan tidak melibatkan masyarakat seperti pembauatan jalan aspal dan menara air. Hal ini karena pembuatan jalan aspal dan menara air membutuh orang-orang yang ahli dibidangnya. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur yang lain seperti jalan usaha tani dan pembuatan jalan cor blok sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam bentuk tenaga, namun juga dalam bentuk swadaya baik materi maupun non materi. Selain pentingnya keterlibatan masyarakat juga pentingnya dukungan dana atau anggaran dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Kalurahan Pacarejo dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran atau dana dari dana desa, APBKal, BBK, CSR, dan bantuan dari pihak swasta serta masyarakat setempat.

c) Pengawasan

Pengawasan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan Pacarejo. Tim pengawasan berbeda dengan tim pelaksanaan, hal ini dilakukan agar hasil yang diterima dapat sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada saat pembangunan infrastruktur jadi 100%, namun dalam masa pelaksanaannya Pemerintah Kalurahan melakukan kontrol untuk mengecek pembangunan yang dilakukan sudah baik atau belum. Artinya ketika dilapangan

terjadi kendala atau kurangnya kualitas pembangunan infrastruktur, maka dapat terlebih dahulu di perbaiki. Kemudian, warga masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan pembangunan baik dari segi kualitas dan dana. Saat ini Pemerintah Kalurahan Pacarejo sudah membuat *website* yaitu Pacarejo.id. di dalam *website* tersebut sudah ada informasi-informasi terkait pembangunan yang dilaksanakan dan dana atau anggaran yang dikeluarkan untuk dalam melaksanakan setiap pembangunan infrastruktur.

2. Hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Pacarejo

Hambatan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu pertama, hambatan dari luas wilayah Kalurahan Pacarejo yang memiliki 28 padukuhan. Hal ini membuat dalam satu tahun tidak semua padukuhan penerima pembangunan infrastruktut. Kedua, kurangnya kajian dan analisis dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dalam pelaksanaan ada beberapa pembangunan infrastruktur yang mengalami kegagalan dan tidak bertahan dalam waktu yang lama serta kualitas pembangunan kurang baik. Ketiga, kondisi alam atau iklim yang tidak menentu membuat pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Keempat, anggaran yang terbatas yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Pacarejo membuat pemerintah harus pandai-pandai dalam pembagian anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Kelima, warga yang kurang sependapat serta kurangnya pemahaman masyarakat, hal ini biasanya terjadi karena masyarakat kurang mendapat kejelasan dalam pembangunan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

DAFTAR REFERENSI

Bawono, R Icuk dan Setyadi Erwin. 2019. *Panduan Pengunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa. 2016

Cahyani C, Sinta. 2021. *Tesis " Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

Hagie, Teofilus. 2019. *Skripsi "Manajemen Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur"*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Erlangga, Jakarta

Mono, Asdar. 2022. *Tesis "Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan"*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

Triputro Widodo R. 2019. *Regulasi Desa*. Deepublish, Yogyakarta

Raharjo Mu'iz M. 2021. *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. PT Raja Grafindo Persada, Depok

Salusu J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Granfindo Persada, Jakarta.

Sugiyono.2013. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Distertasi*. Alfabeta, Bandung

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Syah N, Bella. 2020. *Skripsi "Strategi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bagi Pengguna Trans Jogja*". Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta